



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN  
LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran instansi pemerintah, perlu dilakukan penanganan risiko secara tepat dengan melakukan penilaian risiko serta penetapan kegiatan pengendalian;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, maka KPU Kabupaten Bolaang Mongondow telah melaksanakan penilaian risiko level Aktivitas serta telah merumuskan kegiatan pengendalian, yang hasilnya harus ditetapkan dalam sebuah Keputusan yang mengikat, supaya dapat dilaksanakan semua unsur dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bolaang Mongondow tentang Penetapan Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktivitas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 224);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 984);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 38/PR.01.3-Kpt/7101/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9/PR.01.3-Kpt/7101/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 38/PR.01.3-Kpt/7101/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 41/PR.03/7101/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 10/PR.03/7101/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 41/PR.03/7101/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024.

8. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 02/PP.04.1-BA/7101/2023 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, Tanggal 2 Januari 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktivitas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktivitas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:

1. Hasil Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal sebagaimana Lampiran I Keputusan ini;
2. Kriteria dan Skala yang digunakan dalam penilaian risiko, sebagaimana Lampiran II Keputusan ini;
3. Penetapan Tujuan Lebel Aktivitas, sebagaimana Lampiran III Keputusan ini;
4. Identifikasi Risiko, sebagaimana Lampiran IV Keputusan ini;
5. Analisis Risiko yang diformulasikan dalam Peta Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini;

6. Indikator Risiko/Evaluasi Risiko, sebagaimana dalam Lampiran VI Keputusan ini;
7. Kegiatan Pengendalian atau Rencana Aksi Pengendalian Risiko sebagaimana Lampiran VII Keputusan ini.

- KETIGA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktivitas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA, menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow dalam melakukan kegiatan pengendalian level Aktivitas.
- KEEMPAT : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktivitas dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali di setiap tahun.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 2 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Evie Jane Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR  
20 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN HASIL  
PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN  
PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN  
2023

HASIL ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

<b>No</b>	<b>KATEGORI RISIKO</b>	<b>TOPIK RISIKO</b>	<b>PERNYATAAN RISIKO</b>	<b>POTENSI DAMPAK</b>	<b>REFERENSI</b>
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
I	<b>EKSTERNAL</b>				
	Sosial & Politik	Presentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Tidak diinformasikannya kedudukan Sekretariat dan Struktur Kepengurusan Partai Politik ke KPU Kabupaten ketika terjadi perubahan	Informasi KPU tidak dapat diterima oleh semua Partai Politik, sehingga dapat menjadi celah sengketa terkait prinsip adil dan setara	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
			Kurangnya informasi terkait no telepon pengurus yang dapat dihubungi.	Terhambatnya penjabaran informasi, baik terkait Pemilu/Pemilihan maupun kelembagaan.	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020

No	KATEGORI RISIKO	TOPIK RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	POTENSI DAMPAK	REFERENSI
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
			adanya pergantian pengurus Parpol yang tidak diinformasikan ke KPU	Sulitnya KPU berkoordinasi dengan Parpol	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
			Dualisme Kepengurusan Partai Politik	Diperlukan waktu untuk koordinasi/konsultasi, baik dengan KPU Provinsi maupun dengan pengurus Partai Politik di tingkat selanjutnya.	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
	Ekonomi	Kondisi ekonomi akibat pandemi	terjadinya refocusing anggaran (banyak anggaran yang dialihkan untuk penanganan Covid-19)	beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
				Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Badan <i>Adhoc</i> tidak terlaksana secara optimal	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
	Lingkungan	Bencana alam (cuaca ekstrem, banjir, tanah longsor)	di beberapa wilayah rawan terjadi banjir dan tanah longsor	terganggunya penyelenggaraan tahapan, program dan jadwal Pemilu/Pemilihan	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020

<b>No</b>	<b>KATEGORI RISIKO</b>	<b>TOPIK RISIKO</b>	<b>PERNYATAAN RISIKO</b>	<b>POTENSI DAMPAK</b>	<b>REFERENSI</b>
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
		Bencana NonAlam	belum dapat dipastikan akhir pandemi <i>Covid-19</i>	masyarakat masih khawatir untuk datang ke TPS	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
				masyarakat masih khawatir untuk berpartisipasi dalam program dan kegiatan Pemilu/Pemilihan.	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
				terganggunya penyelenggaraan tahapan, program dan jadwal Pemilu/Pemilihan.	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
				berubahnya pola sosialisasi dan pelaksanaan kampanye dari luring ke daring yang memerlukan adaptasi dan dianggap tidak efektif.	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
		Daerah Rawan Konflik	terdapat beberapa wilayah yang rawan konflik	terganggunya penyelenggaraan tahapan, program dan jadwal Pemilu/Pemilihan.	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 (Wilayah Dumoga Raya)

<b>No</b>	<b>KATEGORI RISIKO</b>	<b>TOPIK RISIKO</b>	<b>PERNYATAAN RISIKO</b>	<b>POTENSI DAMPAK</b>	<b>REFERENSI</b>
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
	Keuangan	Anggaran Pemilu	terjadinya pengurangan anggaran	beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
	IT & Infrastruktur	Jaringan Internet	di beberapa wilayah tidak ada jaringan internet serta sering terjadi gangguan jaringan internet	koordinasi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
		insfrastruktur jalan	di beberapa wilayah terdapat jalan yang rusak dan berbatu	sehingga beberapa wilayah tidak dapat dijangkau	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
		listrik	sering terjadi pemadaman listrik	beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
	SDM	Prekrutan Badan Ad Hoc	di beberapa wilayah SDM kurang memenuhi standart persyaratan anggota badan ad hoc	sulitnya mencapai kuota pendaftaran penyelenggara badan ad hoc	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020

No	KATEGORI RISIKO	TOPIK RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	POTENSI DAMPAK	REFERENSI
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
			di beberapa wilayah kurangnya minat masyarakat untuk menjadi penyelenggara badan ad hoc	sulitnya mencapai kuota pendaftaran penyelenggara badan ad hoc	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
II	<b>INTERNAL</b>				
	Strategik	Fungsi Satgas SPIP	SPIP dilaksanakan baru sebatas Pembentukan	Belum terlaksananya secara internal terkait pemahaman, diseminasi terkait SPIP, pemetaan kondisi pengendalian intern, penyusunan rencana kerja dan pengembangan SPIP, pembangunan infrastruktur, internalisasi, serta pengembangan berkelanjutan.	Laporan SPIP Tahun 2023
	Personil	kekurangan SDM	SDM mengerjakan beberapa tugas sekaligus	Beban kerja lebih banyak	Laporan SPIP Tahun 2023
	Proses	Jadwal kegiatan Tahapan yang saling beririsan	adanya pelaksanaan kegiatan tahapan yang bersamaan	adanya beban kerja yang berlebih di salah satu personil/bagian	Laporan SPIP Tahun 2023
	IT dan Infrastuktur	Kantor dan Gudang	belum ada kantor dan gudang tetap milik KPU Kab. Bolaang Mongondow	setiap tahun harus di anggarkan dana untuk sewa kantor dan gudang	Laporan SPIP Tahun 2023

<b>No</b>	<b>KATEGORI RISIKO</b>	<b>TOPIK RISIKO</b>	<b>PERNYATAAN RISIKO</b>	<b>POTENSI DAMPAK</b>	<b>REFERENSI</b>
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
				sering pindah menyebabkan banyak dokumen yang tercecer	Laporan SPIP Tahun 2023
		Jaringan Internet	jaringan internet dalam kantor sering berpindah karena mengikuti perpindahan kantor	terkendalanya kegiatan daring	Laporan Pemilihan Tahun 2020
				pekerjaan yang menggunakan jaringan internet terhambat	Laporan Pemilihan Tahun 2020
				koordinasi kurang lancar	Laporan Pemilihan Tahun 2020
	Keuangan	pengusulan anggaran yang diajukan banyak yang tidak diakomodir	anggaran tidak sesuai kebutuhan	kegiatan yang telah direncanakan banyak yang tidak terlaksana	Laporan Pemilihan Tahun 2020
		proses pencairan anggaran Pilbup dari Pemerintah Daerah sering terlambat	Lambatnya proses pencairan anggaran Pilbup dari Pemerintah daerah	banyaknya kegiatan yang berjalan tidak maksimal	Laporan Pemilihan Tahun 2017
	Informasi	Media Sosial	Kebijakan platform (twitter) yang ketat terkait spam	akun sering di suspend	Laporan Pemilihan Tahun 2020

1. Kolom (a) diisi nomor urut.
2. Kolom (b) diisi kategori risiko sesuai dengan risk taxonomy misalnya ; Ekonomi, Lingkungan Alam, Politik dan Sosial.
3. Kolom (c) diisi dengan topik risiko sesuai dengan risk taxonomy misalnya ; untuk kategori Sosial Politik adalah adanya peraturan-peraturan yang membatasi peran KPU.
4. Kolom (d) diisi uraian pernyataan potensial/nama risiko yang dapat terjadi sesuai dengan topik risiko yang ada di kolom (c).
5. Kolom (e) diisi uraian dampak berdasarkan potensial risiko pada kolom d
6. Kolom (f) diisi jika ada referensi yang digunakan dalam pengisian formulir

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 2 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Evie Jane Indria, S.H., M.Si



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN BOLAANG  
 MONGONDOW NOMOR 20 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN HASIL  
 PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN  
 PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN BOLAANG  
 MONGONDOW TAHUN 2023

KRITERIA DAN SKALA YANG DIGUNAKAN DALAM PENILAIAN RISIKO

A. KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Sangat Kecil	Sangat kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	1
2	Kecil	Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	2
3	Moderat	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	3
4	Hampir Pasti	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	4
5	Pasti	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	5

B. KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Tidak Signifikan	Tidak berdampak pada pencapaian sasaran secara umum/Tidak ada Kerugian financial/Tidak ada cedera/Tidak ada dampak hukum/ Risiko lingkungan tidak ada	1
2	Kecil	Mengganggu pencapaian sasaran meskipun tidak signifikan/ Kerugian financial kecil/ Perlu pertolongan pertama/Dampak hukum kecil /Risiko lingkungan kecil	2

3	Sedang	Mengganggu pencapaian sebagian sasaran secara signifikan / Kerugian financial sedang / Perlu penanganan medis / Dampak hukum sedang/ Risiko lingkungan sedang	3
4	Besar	Sebagian sasaran tidak tercapai / Kerugian financial besar / Cidera yg meluas /Dampak hukum besar / Risiko lingkungan besar	4
5	Sangat besar/Katastrofik	Seluruh sasaran tidak tercapai/ Kerugian financial sangat besar/ kematian /Dampak hukum sangat besar /Risiko lingkungan sangat besar	5

C. LEVEL RISIKO: HASIL PERKALIAN NILAI KEMUNGKINAN DAN DAMPAK

RANGE	WARNA	LEVEL RISIKO	
21-25	MERAH	5	SANGAT TINGGI
16-20	ORANGE	4	TINGGI
11-15	KUNING	3	SEDANG
6-10	BIRU	2	RENDAH
1-5	HIJAU	1	SANGAT RENDAH

Kriteria yang digunakan untuk menentukan batas antara risiko yang tidak dapat diterima dan dapat diterima adalah sebagai berikut:

Kriteria yang digunakan untuk menentukan batas antara risiko yang tidak dapat diterima dan dapat diterima adalah sebagai berikut:

Katartropik (5)	5 Acceptable	10 Issues	15 Unacceptable	20 Unacceptable	25 Unacceptable
Besar (4)	4 Acceptable	6 Supplementary issue	12 Issues	16 Unacceptable	20 Unacceptable
Sedang (3)	3 Acceptable	6 Supplementary issue	9 Issues	12 Issues	15 Unacceptable
Kecil (2)	2 Acceptable	4 Acceptable	6 Supplementary issue	8 Supplementary issue	10 Issues
Tidak Signifikan (1)	1 Acceptable	2 Acceptable	3 Acceptable	4 Acceptable	5 Acceptable
	Jarang (1)	Kemungkinan Kecil (2)	Kemungkinan Sedang (3)	Kemungkinan Besar (4)	Hampir Pasti (5)
	Probabilitas/Likelihood				

Ditetapkan di Lolak  
Pada tanggal 2 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



*[Handwritten Signature]*  
Evie Jane Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN  
KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023

PENETAPAN TUJUAN LEVEL AKTIVITAS

**Unit Pemilik Risiko**

: Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik; Sub Bagian Program dan Data; Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; serta Sub Bagian Hukum dan SDM

**Periode Penerapan**

: 2023

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan
1	2	3	4	5
I	Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi terkait dalam rangka penguatan demokrasi	Program kegiatan kerjasama dengan instansi terkait harus melalui KPU RI dan tidak tersedianya anggaran atau fasilitasi kerjasama dengan Instansi Terkait
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	Kurangnya kompetensi Pegawai dalam melaksanakan kinerja Pegawai

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan
1	2	3	4	5
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Tidak tersedianya anggaran untuk menambah sarana dan belum ada kantor tetap sehingga prasarana kantor disesuaikan dengan sewa gedung kantor baru.
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Adanya Temuan yang masih ditindaklanjuti
			Jumlah Laporan Keuangan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Kurangnya SDM menyebabkan pegawai yang berkompetensi memiliki beban kerja yang lebih berat sehingga dokumen atau laporan yang tersedia tidak tepat waktu
			Nilai Evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Kurangnya implementasi budaya organisasi

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan
1	2	3	4	5
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	Tidak tersedianya anggaran untuk ke Kecamatan/Kelurahan untk Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan
1	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Program kegiatan kerjasama dengan instansi terkait harus melalui KPU RI dan tidak tersedianya anggaran atau fasilitasi kerjasama dengan Instansi Terkait
		Terwujudnya Rencana Kerja dan anggaran KPU Bolaang Mongondow yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	Adanya pemangkasan anggaran

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan
1	2	3	4	5
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Belum terlaksananya secara internal terkait pemahaman, diseminasi terkait SPIP, pemetaan kondisi pengendalian intern, penyusunan rencana kerja dan pengembangan SPIP, pembangunan infrastruktur, internalisasi, serta pengembangan berkelanjutan.
			Persentase target kinerja KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	Adanya pemangkasan dan revisi anggaran
			Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	Kurangnya SDM menyebabkan pegawai yang berkompentensi memiliki beban kerja yang lebih berat sehingga dokumen atau laporan yang tersedia tidak tepat waktu

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan
1	2	3	4	5
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Presentasi KPU Kab/Kota yang di tunjuk sebagai Pilot Project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri B	Belum adanya petunjuk untuk dilaksanakan kegiatan Pilot Project di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	Adanya pegawai yang kurang bekerjasama dalam memenuhi layanan kepegawaian
			Presentase penegakan disiplin pegawai	Masih adanya toleransi untuk kebijakan penegakan disiplin pegawai
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	Adanya pegawai yang kurang bekerjasama dalam memenuhi layanan kepegawaian

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan
1	2	3	4	5
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	Sulitnya mencapai kuota pendaftaran penyelenggara badan ad hoc
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Kurangnya SDM menyebabkan pegawai yang berkompetensi memiliki beban kerja yang lebih berat sehingga dokumen atau laporan yang tersedia tidak tepat waktu
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Kurangnya SDM menyebabkan pegawai yang berkompetensi memiliki beban kerja yang lebih berat sehingga dokumen atau laporan yang tersedia tidak tepat waktu
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan dapat diselesaikan	Kurangnya SDM menyebabkan pegawai yang berkompetensi memiliki beban kerja yang lebih berat sehingga dokumen atau laporan yang tersedia tidak tepat waktu

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan
1	2	3	4	5
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	Kurang SDM menyebabkan pegawai yang berkompetensi memiliki beban kerja yang lebih berat sehingga dokumen atau laporan yang tersedia tidak tepat waktu
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan dan ketertiban KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	Pengelolaan Aset BMN yang tidak dapat dikelola dikarenakan blm dikembalikan oleh Penanggung Jawab barang
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	Pengelolaan Aset BMN yang tidak dapat dikelola dikarenakan blm dikembalikan oleh Penanggung Jawab barang
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	Kurang pemahaman terkait retensi arsip

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan
1	2	3	4	5
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	Sarana transportasi banyak dalam keadaan rusak atau tidak dapat digunakan
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	Fasilitas perkantoran banyak dalam keadaan rusak atau tidak dapat digunakan
			Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang dapat dipenuhi	Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Bolaang Mongondow selalu berpindah-pindah karena tidak memiliki Gedung dan Gudang tetap atau milik KPU Kabupaten Bolaang Mongondow
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	Pada Pandemi Covid-19 kegiatan lebih cenderung dilaksanakan secara daring

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan
1	2	3	4	5
			Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	Adanya kegiatan rapat yang dilaksanakan berturut-turut setiap hari; adanya arahan kegiatan dari KPU Provinsi Sulawesi Utara atau KPU RI
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dapat ditanggulangi	Jika ada kerusuhan secara tiba-tiba atau kecurian, tidak ada yang bertanggung jawab
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah III	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Penyusunan Laporan SPIP KPU Kab/Kota	Kurang SDM menyebabkan pegawai yang berkompetensi memiliki beban kerja yang lebih berat sehingga dokumen atau laporan yang tersedia tidak tepat waktu
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	Tindak lanjut tergantung dari SDM yang mendapatkan rekomendasi

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan
1	2	3	4	5
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Pelaksanaan kinerja tidak berdasarkan anggaran
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Dokumen Riset dan jurnal Kepemiluan	Tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow
7	Pelaksanaan Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di lingkungan KPU	Terlaksananya Layanan Perkantoran	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai di lingkungan KPU Kabupaten	Adanya kekurangan gaji dan tunjangan pegawai
		Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pengelolaan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tingkat uakpa dan uappa-W	Adanya permasalahan rekonsiliasi Laporan Keuangan

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan
1	2	3	4	5
		Tersusunnya Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan Anggaran	Penerapan Lap. Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan Valid	Adanya permasalahan jaringan sehingga pengisian data menjadi tidak tepat waktu; Adanya keterlambatan waktu menerima data untuk diinput; Adanya kesalahan data untuk diinput
II	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	Peraturan KPU tidak tepat waktu/terlambat diterbitkan
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	Adanya kekurangan logistik Pemilu/Pemilihan di tingkat Badan Ad Hoc

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan
1	2	3	4	5
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	Jika terjadi bencana menyebabkan tertundanya Pemilu/Pemilihan; Jika tidak tercapainya target rekrutmen badan ad hoc menyebabkan Pemilu/Pemilihan tidak diselenggarakan sesuai jadwal
1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Pengelolaan Produk hukum yang disusun, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan tidak terkelola dengan baik
		Terlaksananya pengelolaan pelayan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	Pengelolaan Dokumen dan Pelayanan Hukum tidak terkelola dengan baik

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan
1	2	3	4	5
2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Kabupaten/Kota	Anggaran penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum tidak mencukupi
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	Anggaran penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum tidak mencukupi
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	Peraturan KPU diterbitkan tidak tepat waktu/terlambat, sehingga penyusunan kurang optimal atau dilaksanakan dengan terburu-buru
			Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2024	Jika terjadi bencana menyebabkan terkendalanya penetapan daerah pemilihan yang tepat waktu

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan
1	2	3	4	5
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	Anggaran dalam melaksanakan proses PAW tidak tersedia sehingga harus diusulkan dan direvisi
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	Tergantung dari Calon Peserta Pemilu yang mendaftar atau lolos verifikasi
		Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Peraturan KPU diterbitkan tidak tepat waktu/terlambat, sehingga penyusunan kurang optimal atau dilaksanakan dengan terburu-buru
		Tersedianya Pedoman Laporan dan Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah Dokumen SOP atau Petunjuk Teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	Peraturan KPU diterbitkan tidak tepat waktu/terlambat, sehingga penyusunan kurang optimal atau dilaksanakan dengan terburu-buru

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan
1	2	3	4	5
			<p>Persentase data kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik yang dimutakhirkan</p>	<p>Kurangnya informasi terkait no telepon pengurus yang dapat dihubungi; Kurangnya respon dari beberapa pengurus/ LO Partai Politik terhadap permintaan data/ dokumen kepengurusan Partai Politik termuktahir; Beberapa Partai Politik belum melaksanakan Musyawarah Nasional, sedangkan SK kepengurusan telah lewat masa berlakunya.</p>
4	<p>Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</p>	<p>Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu</p>	<p>Kabupaten yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih</p>	<p>Tidak adanya anggaran dalam membentuk Pusat Pendidikan Pemilih</p>
			<p>Persentase KPU Kabupaten yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)</p>	<p>Oleh karena belum mempunyai gedung kantor paten sehingga fasilitas RPP setiap berpindah kantor harus disusun kembali dan Tidak tersedianya anggaran pembentukan maupun Digitalisasi RPP</p>

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan
1	2	3	4	5
		Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	Tidak tersedianya anggaran untuk membentuk "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum
		Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Perempuan	Tidak tersedianya anggaran untuk membentuk "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Perempuan
			Persentase satker KPU Kabupaten yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Pemula	Tidak tersedianya anggaran untuk membentuk "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Pemula
			Persentase satker KPU Kabupaten yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Disabilitas	Tidak tersedianya anggaran untuk membentuk "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Disabilitas

<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)</b>	<b>Permasalahan</b>
1	2	3	4	5
		Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan/atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	Tidak tersedianya anggaran untuk membentuk "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Kurangnya sosialisasi pelayanan informasi melalui PPID
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Lokal	Tidak tersedianya anggaran informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan dimuat di media massa lokal

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan
1	2	3	4	5
			<p>Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja</p>	<p>Kekurangan SDM yang melaksanakan tugas pengelolaan informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan dan SDM yang tersedia kurang berkompetensi untuk melakukan pengelolaan informasi dan publikasi</p>
		<p>Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)</p>	<p>Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi</p>	<p>Kekurangan SDM yang melaksanakan tugas pengelolaan informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan dan SDM yang tersedia kurang berkompetensi untuk melakukan pengelolaan informasi dan publikasi</p>
5	<p>Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</p>	<p>Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu / pemilihan</p>	<p>Persentase KPU Kabupaten yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik</p>	<p>Kekurangan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan logistik</p>

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan
1	2	3	4	5
			<p>Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu /Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara</p>	<p>Kekurangan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan logistik</p>
			<p>Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu</p>	<p>Adanya kekurangan logistik Pemilu/Pemilihan di tingkat Badan Ad Hoc</p>
			<p>Persentase KPU Kabupaten / Kota menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu</p>	<p>Adanya kekurangan logistik Pemilu/Pemilihan di tingkat Badan Ad Hoc</p>
		<p>Ketersediaan Logistik Pemilu</p>	<p>Persentase penyediaan logistik Pemilu</p>	<p>Adanya kekurangan logistik Pemilu/Pemilihan di tingkat Badan Ad Hoc</p>

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan
1	2	3	4	5
		Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	Adanya permasalahan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang atau Penghitungan Suara Ulang; Adanya permasalahan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara; Adanya permasalahan dalam Penetapan Hasil Pemilu
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten/ Kota melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	Tidak tersedianya anggaran untuk ke Kecamatan/Kelurahan untuk kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	Seringnya mati lampu; Pindah kantor baru menyebabkan wifi kantor juga harus dipindahkan dan menyesuaikan dengan lokasi kantor baru

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan
1	2	3	4	5
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	Link masih dibuatkan secara manual atau belum melalui aplikasi tertentu

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 2 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Evie Jane Indria, S.H., M.Si



LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN  
PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN 2023

IDENTIFIKASI RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik; Sub Bagian Program dan Data; Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; serta Sub Bagian Hukum dan SDM

Periode Penerapan : 2023

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan	Risiko Pernyataan	Pemilik	Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
					Uraian	Sumber	C/U C	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi terkait dalam rangka penguatan demokrasi	Program kegiatan kerjasama dengan instansi terkait harus melalui KPU RI dan tidak tersedianya anggaran atau fasilitas kerjasama dengan Instansi Terkait	Fasilitas Kerjasama dengan Instansi terkait tidak terlaksana	Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Tidak Tersedianya anggaran	Internal KPU	UC	Tidak terlaksananya Fasilitas Kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka penguatan demokrasi	Internal KPU, Instansi terkait	Rencana Kerjasama dikoordinasikan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Sulawesi Utara	Fasilitas Kerjasama dengan Instansi terkait menunggu hasil koordinasi dengan KPU RI	5
2	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	Kurangnya kompetensi Pegawai dalam melaksanakan kinerja Pegawai	Kurangnya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan untuk peningkatan kompetensi Pegawai	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Kurangnya kegiatan peningkatan kompetensi Pegawai	Internal KPU	C	Kurangnya kompetensi Pegawai dalam melaksanakan kinerja Pegawai	Internal KPU	Dihimbau untuk melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri	Kurangnya motivasi dalam peningkatan kompetensi secara mandiri	2
3	Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Tidak tersedianya anggaran untuk menambah sarana dan belum ada kantor tetap sehingga prasarana kantor disesuaikan dengan sewa gedung kantor baru.	Prasarana kantor menyesuaikan dengan kantor baru dan Fasilitas peralatan kantor banyak dalam keadaan rusak atau tidak dapat digunakan serta Sarana transportasi kantor banyak dalam keadaan rusak atau tidak dapat digunakan	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Gedung Kantor masih sewa dan tidak ada anggaran untuk Belanja Modal	Internal KPU	C	Tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	Internal KPU	Menggunakan fasilitas sarana dan prasarana yang ada	Sarana peralatan kantor dalam keadaan rusak dan tidak dapat digunakan	5
4	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Adanya Temuan yang masih ditindaklanjuti	menerapkan LAKIP sebagai alat ukur, evaluasi dan keberhasilan kinerja	Sub Bagian Program dan Data	belum di manfaatkan secara optimal LAKIP dalam evaluasi kinerja	Internal KPU	C	adanya temuan yang masih di tindak lanjuti	Internal KPU	LAKIP dapat digunakan untuk perbaikan kinerja di tahun berikutnya	meminimalisir hasil temuan setiap tahun anggaran	2
5	Jumlah Laporan Keuangan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Kurangnya SDM menyebabkan pegawai memiliki beban kerja yang lebih berat sehingga dokumen atau laporan yang tersedia tidak tepat waktu	SDM mengerjakan beberapa tugas sekaligus	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Adanya keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan secara internal	Internal KPU	C	Laporan Keuangan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow disusun tidak tepat waktu	Internal KPU	Sebelum batas waktu Pelaporan sudah dipersiapkan untuk disusun	Tidak ada sisa resiko	1

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U C	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Nilai Evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Kurangnya implementasi budaya organisasi	Kurangnya pemahaman tentang budaya organisasi	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik; Sub Bagian Program dan Data; Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas; dan Sub Bagian Hukum	Kurangnya implementasi budaya organisasi	Internal KPU	C	Masih ada Pegawai yang kurang disiplin	Internal KPU	Diimplementasikan sebagai bagian dari SPIP	Masih ada Pegawai yang kurang disiplin	2
7	Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	Tidak tersedianya anggaran untuk ke Kecamatan/Kelurahan untuk Pemutakhirkan Data Pemilih secara Berkelanjutan	Terkendalanya kegiatan Pemutakhirkan Data Pemilih Berkelanjutan	Sub Bagian Program dan Data	Tidak Tersedianya anggaran	Internal KPU	C	Target sasaran kegiatan Persentase KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Pemutakhirkan Data Pemilih secara Berkelanjutan tidak terpenuhi	Internal KPU	memanfaatkan mantan PPK yang masih bersedia untuk bekerja sama dalam memperoleh data kependudukan yang ada di kecamatan/desa	Bertambahnya jumlah masyarakat yang masuk wajib pilih di kecamatan/desa yang tidak masuk dalam DPT	4
8	Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Program kegiatan kerjasama dengan instansi terkait harus melalui KPU RI dan tidak tersedianya anggaran atau fasilitasi kerjasama dengan Instansi Terkait	Fasilitas Kerjasama dengan Instansi terkait tidak terlaksana	Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Tidak Tersedianya anggaran	Internal KPU	UC	Tidak terlaksananya Fasilitasi Kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka penguatan demokrasi	Sub Bagian terkait, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, Instansi terkait	Rencana Kerjasama dikoordinasikan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Sulawesi Utara	Fasilitasi Kerjasama dengan Instansi terkait menunggu hasil koordinasi dengan KPU RI	5
9	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	Adanya pemangkasan anggaran	anggaran yang termuat dalam DIPA kurang	Sub Bagian Program dan Data	revisi di laksanakan untuk optimalisasi anggaran	Internal KPU	C	beberapa kegiatan tertunda karena menunggu revisi	Internal KPU	melakukan pencermatan anggaran	beberapa kegiatan tidak terakomodir	2
10	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Belum terlaksananya secara internal terkait pemahaman, diseminasi terkait SPIP, pemetaan kondisi pengendalian intern, penyusunan rencana kerja dan pengembangan SPIP, pembangunan infrastruktur, internalisasi, serta pengembangan berkelanjutan.	SPIP dilaksanakan baru sebatas Pembentukan dan pelaporan	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik; Sub Bagian Program dan Data; Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas; dan Sub Bagian Hukum	Belum terlaksananya secara internal terkait pemahaman, diseminasi terkait SPIP, pemetaan kondisi pengendalian intern, penyusunan rencana kerja dan pengembangan SPIP, pembangunan infrastruktur, internalisasi, serta pengembangan berkelanjutan.	Internal KPU	C	Laporan monitoring dan evaluasi disusun tidak akuntabel	Internal KPU	Laporan monitoring dan evaluasi sesuai jadwal	Penyusunan hanya sebatas pelaporan dan tidak diperiksa	2
11	Persentase target kinerja KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	Adanya pemangkasan dan revisi anggaran	Kegiatan yang sudah di termuat di DIPA tidak jadi dilaksanakan	Sub Bagian Program dan Data	pemangkasan anggaran langsung dari pusat	Internal KPU	C	target kinerja yang termuat daam Perjanjian Kinerja tidak tercapai	Internal KPU	melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersisa	pelaksanaan kegiatan tidak maksimal	2

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U C	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	Kurangnya SDM menyebabkan pegawai yang berkompetensi memiliki beban kerja yang lebih berat sehingga dokumen atau laporan yang tersedia tidak tepat waktu	SDM mengerjakan beberapa tugas sekaligus	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Kurangnya SDM menyebabkan pegawai yang berkompetensi memiliki beban kerja yang lebih berat sehingga dokumen atau laporan yang tersedia tidak tepat waktu	Internal KPU	C	Dokumen RDP tidak tersedia tepat waktu	Internal KPU	Setelah dilaksanakan RDP langsung dilakukan penyusunan Dokumen RDP	Tidak ada sisa resiko	1
13	Presentasi KPU Kab/Kota yang di tunjuk sebagai Pilot Project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri B	Belum adanya petunjuk untuk dilaksanakan kegiatan Pilot Project di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Belum ada petunjuk untuk dilaksanakan program kegiatan Pilot Project	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Belum adanya petunjuk untuk dilaksanakan kegiatan Pilot Project di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Internal KPU	UC	Tidak terpenuhinya sasaran kegiatan Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Internal KPU	Menunggu Petunjuk untuk dilaksanakannya kegiatan Pilot Project	Tidak ada sisa resiko	5
14	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	Adanya pegawai yang kurang bekerjasama dalam memenuhi layanan kepegawaian	Pegawai kurang kerjasama	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Adanya pegawai yang kurang bekerjasama dalam memenuhi layanan kepegawaian	Pegawai yang bersangkutan	C	Tidak terpenuhinya persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	Pegawai yang bersangkutan	Ditegaskan kepada Pegawai yang bersangkutan untuk bekerja sama dalam pelayanan kepegawaian	Tidak ada sisa resiko	5
15	Persentase penegakan disiplin pegawai	Masih adanya toleransi untuk kebijakan penegakan disiplin pegawai	Kurangnya pemahaman tentang budaya organisasi	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pegawai masih kurang disiplin	Internal KPU	C	Tidak tercapainya target sasaran kegiatan persentase penegakan disiplin Pegawai	Internal KPU, Pegawai yang bersangkutan	Tetap diterapkan Penegakan Disiplin Pegawai	Target Sasaran Kegiatan tidak terpenuhi	5
16	Persentase Pegawai KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	Adanya pegawai yang kurang bekerjasama dalam memenuhi layanan kepegawaian	Pegawai kurang kerjasama	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pegawai masih kurang disiplin	Internal KPU	C	Target Sasaran Kegiatan Persentase Pegawai KPU Kabupaten Bolaang Mongondow tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi tidak tercapai	Internal KPU, Pegawai yang bersangkutan	Sebelum batas waktu Pelaporan sudah dipersiapkan untuk disusun dan Pegawai yang bersangkutan ditindak secara tegas untuk memenuhi sasaran kegiatan	Persentase Pegawai KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi tidak terpenuhi	5

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U C	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	Sulitnya mencapai kuota pendaftaran penyelenggara badan ad hoc	di beberapa wilayah SDM tidak memenuhi standart persyaratan anggota badan ad hoc dan di beberapa wilayah minat masyarakat untuk menjadi penyelenggara badan ad hoc sangat minim	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Peserta tidak memenuhi syarat dan tidak mencukupi kuota pendaftar	Eksternal KPU	C	Jumlah badan Ad hoc yang dipersiapkan dan dibentuk tidak memenuhi target	Internal KPU	Peserta diambil dari desa lain	Calon Badan Ad Hoc tidak berkompentensi melaksanakan tugas	5
18	Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Kurangnya SDM menyebabkan pegawai yang berkompentensi memiliki beban kerja yang lebih berat sehingga dokumen atau laporan yang tersedia tidak tepat waktu	SDM mengerjakan beberapa tugas sekaligus	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Kurangnya SDM yang berkompentensi melaksanakan tugas	Internal KPU	C	Target sasaran kegiatan Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan tidak terpenuhi	Internal KPU	Sebelum waktu pelaporan telah dipersiapkan untuk dilakukan penyusunan	Tidak ada sisa risiko	2
19	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Kurangnya SDM menyebabkan pegawai yang berkompentensi memiliki beban kerja yang lebih berat sehingga dokumen atau laporan yang tersedia tidak tepat waktu	SDM mengerjakan beberapa tugas sekaligus	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Kurangnya SDM yang berkompentensi melaksanakan tugas	Internal KPU	C	Target sasaran kegiatan Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tidak terpenuhi	Internal KPU	Sebelum waktu pelaporan telah dipersiapkan untuk dilakukan penyusunan	Tidak ada sisa risiko	2
20	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan dapat diselesaikan	Kurangnya SDM menyebabkan pegawai yang berkompentensi memiliki beban kerja yang lebih berat sehingga dokumen atau laporan yang tersedia tidak tepat waktu	SDM mengerjakan beberapa tugas sekaligus	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Kurangnya SDM yang berkompentensi melaksanakan tugas	Internal KPU	C	Target sasaran kegiatan Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan dapat diselesaikan tidak terpenuhi	Internal KPU	Sebelum waktu pelaporan telah dipersiapkan untuk dilakukan penyusunan	Tidak ada sisa risiko	2
21	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	Kurangnya SDM menyebabkan pegawai yang berkompentensi memiliki beban kerja yang lebih berat sehingga dokumen atau laporan yang tersedia tidak tepat waktu	SDM mengerjakan beberapa tugas sekaligus	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Kurangnya SDM yang berkompentensi melaksanakan tugas	Internal KPU	C	Target sasaran kegiatan Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid tidak terpenuhi	Internal KPU	Sebelum waktu pelaporan telah dipersiapkan untuk dilakukan penyusunan	Tidak ada sisa risiko	2

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U C	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Persentase kepatuhan dan ketertiban KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	Pengelolaan Aset BMN yang tidak dapat dikelola dikarenakan blm dikembalikan oleh Penanggung Jawab barang	Pengelolaan Aset BMN yang tidak dapat dikelola karena belum dikembalikan oleh Penanggung Jawab barang	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Aset BMN belum dikembalikan oleh penanggungjawab sebelumnya, dan yang bersangkutan sudah tidak bekerja di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Internal KPU; Pegawai yang bersangkutan	UC	Pengelolaan Aset tidak dapat dilakukan secara patuh dan tertib	Internal KPU	Pegawai yang bersangkutan telah dikirimkan surat untuk mengembalikan Aset BMN	Target Sasaran Kegiatan tidak terpenuhi	5
23	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	Pengelolaan Aset BMN yang tidak dapat dikelola dikarenakan blm dikembalikan oleh Penanggung Jawab barang	Pengelolaan Aset BMN yang tidak dapat dikelola karena belum dikembalikan oleh Penanggung Jawab barang	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Aset BMN belum dikembalikan oleh penanggungjawab sebelumnya, dan yang bersangkutan sudah tidak bekerja di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Eksternal KPU	UC	Target sasaran kegiatan Laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK tidak terpenuhi	Internal KPU	Pegawai yang bersangkutan telah dikirimkan surat untuk mengembalikan Aset BMN	Target Sasaran Kegiatan tidak terpenuhi	5
24	Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	Kurangnya pemahaman terkait retensi arsip	Kurangnya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan untuk peningkatan kompetensi Pegawai	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pegawai belum berkompetensi menilai arsip sesuai retensi arsip	Internal KPU	C	Target sasaran kegiatan persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan tidak terpenuhi	Internal KPU	Pegawai diminta untuk melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri mengenai aturan kearsipan	Target Sasaran Kegiatan tidak terpenuhi	5
25	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	Sarana transportasi banyak dalam keadaan rusak atau tidak dapat digunakan	Sarana transportasi kantor banyak dalam keadaan rusak atau tidak dapat digunakan	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggungjawab barang tidak bertanggungjawab dan aset BMN untuk sarana transportasi sudah tidak memadai atau tahun pemakaian sudah lama dan lebih dari 5 tahun	Internal KPU; Pegawai yang bersangkutan	C	Target sasaran kegiatan persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi tidak tercapai	Internal KPU	Menggunakan anggaran untuk memperbaiki atau servis sarana transportasi	Sarana transportasi sudah tidak dapat diperbaiki atau biaya perbaikan sangat mahal	5
26	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	Fasilitas perkantoran banyak dalam keadaan rusak atau tidak dapat digunakan	Fasilitas peralatan kantor banyak dalam keadaan rusak atau tidak dapat digunakan	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Fasilitas peralatan kantor sudah tidak memadai atau tahun pengadaan sudah lebih dari 3 tahun	Internal KPU	C	Target sasaran kegiatan persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi tidak tercapai	Internal KPU	Memperbaiki peralatan kantor yang dapat diperbaiki dan mengusulkan anggaran untuk belanja modal peralatan kantor	Target Sasaran Kegiatan tidak terpenuhi	5
27	Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang dapat dipenuhi	Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Bolaang Mongondow selalu berpindah-pindah karena tidak memiliki Gedung dan Gudang tetap atau milik KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Prasarana kantor menyesuaikan dengan kantor baru	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	KPU Kabupaten Bolaang Mongondow belum memiliki tanah kantor tetap	Internal KPU	C	Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Bolaang Mongondow sering berpindah tempat	Internal KPU; Eksternal KPU	Mengusulkan hibah tanah dari Pemerintah daerah, jika belum selesai pengurusan, tetap menggunakan anggaran sewa Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Target Sasaran Kegiatan tidak terpenuhi	5

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U C	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	Pada Pandemi Covid-19 kegiatan lebih cenderung dilaksanakan secara daring	Adanya pelaksanaan kegiatan tahapan yang bersamaan	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Prasarana kantor menyesuaikan kantor baru	Internal KPU	C	Target sasaran kegiatan persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat tidak terpenuhi	Internal KPU	Menggunakan ruangan yang lain yang memadai untuk dilakukan rapat	Tidak ada sisa risiko	2
29	Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	Adanya kegiatan rapat yang dilaksanakan berturut-turut setiap hari	Adanya pelaksanaan kegiatan tahapan yang bersamaan	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Adanya kegiatan yang dilaksanakan sesuai arahan KPU Provinsi Sulawesi Utara atau KPU RI	Internal KPU	UC	Hasil Rapat Pleno tertunda	Internal KPU	Hasil Rapat leno ditindaklanjuti pada minggu berikutnya	Tidak ada sisa risiko	2
30	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dapat ditanggulangi	Jika ada kerusuhan secara tiba-tiba atau kecurian, tidak ada yang bertanggung jawab	Gangguan keamanan kantor tidak dapat dikendalikan	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pengamanan kantor secara rutin hanya dilakukan oleh Tenaga Honorar	Eksternal KPU	C	Adanya keluhan kehilangan barang	Internal KPU	Telah terpasang kamera cctv	Jika ada kehilangan barang akan ditelusuri melalui kamera cctv	2
31	Penyusunan Laporan SPIP KPU Kab/Kota	Kurangnya SDM menyebabkan pegawai yang berkompentensi memiliki beban kerja yang lebih berat sehingga dokumen atau laporan yang tersedia tidak tepat waktu	SPIP dilaksanakan baru sebatas Pembentukan dan pelaporan	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik; Sub Bagian Program dan Data; Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas; dan Sub Bagian Hukum	Belum terlaksananya secara internal terkait pemahaman, diseminasi terkait SPIP, pemetaan kondisi pengendalian intern, penyusunan rencana kerja dan pengembangan SPIP, pembangunan infrastruktur, internalisasi, serta pengembangan berkelanjutan.	Internal KPU	C	Penyusunan Laporan SPIP KPU Kab/Kota tidak tepat waktu	Internal KPU	Sebelum waktu pelaporan telah dipersiapkan untuk dilakukan penyusunan	Tidak ada sisa risiko	5
32	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	Tindak lanjut tergantung dari SDM yang mendapatkan rekomendasi	Adanya temuan BPKP, Inspektorat atau BPK	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Adanya kesalahan pembayaran yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku	Internal KPU	C	Adanya temuan yang masih ditindak lanjuti	Internal KPU; Yang bersangkutan	Yang bersangkutan diminta untuk membayar TGR	Adanya temuan pada pegawai yang sudah tidak bekerja lagi di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	4

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U C	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Pelaksanaan kinerja tidak berdasarkan anggaran	Akuntabilitas Kinerja tidak berbasis anggaran	Sub Bagian Program dan Data	Adanya kegiatan yang dilaksanakan sesuai arahan KPU Provinsi Sulawesi Utara atau KPU RI	Internal KPU	C	Adanya beban kerja yang lebih berat	Internal KPU	Tetap mengikuti sesuai arahan dan anggaran diusulkan pada periode selanjutnya	Beban kerja yang lebih berat	5
34	Jumlah Dokumen Riset dan jurnal Kepemiluan	Tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Tidak ada kegiatan Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Sub Bagian Teknis Pemilu, dan Hupmas	Tidak Tersedianya anggaran	Internal KPU	UC	Tidak terpenuhinya target sasaran kegiatan Jumlah Dokumen Riset dan Kepemiluan	Internal KPU	Sasaran kegiatan diusulkan dalam perencanaan anggaran	Target Sasaran Kegiatan tidak terpenuhi	5
35	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai di lingkungan KPU Kabupaten	Adanya kekurangan gaji dan tunjangan pegawai	Kekurangan Gaji dan Tunjangan	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Revisi anggaran	Internal KPU	C	Tidak terpenuhinya pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Internal KPU	Dikoordinasikan ke KPU melalui KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk revisi anggaran	Tidak ada sisa risiko	5
36	Pengelolaan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tingkat uakpa dan uappa-W	Adanya permasalahan rekonsiliasi Laporan Keuangan	Terkendala dalam rekonsiliasi Laporan Keuangan	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Kesalahan dalam jumlah hasil rekonsiliasi	Internal KPU	C	Terkendala dalam pengelolaan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat UAKPA dan UAPPA-W	Internal KPU	Kesalahan diperbaiki dan melakukan rekonsiliasi kembali	Tidak ada sisa risiko	1
37	Penerapan Lap. Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan Valid	Adanya permasalahan jaringan sehingga pengisian data menjadi tidak tepat waktu; Adanya keterlambatan waktu menerima data untuk diinput; Adanya kesalahan data untuk diinput	Terkendala dalam pengisian SIMONIKA	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Permasalahan jaringan waktu pengisian data; permasalahan dalam penerimaan data untuk penginputan; Kesalahan dalam penginputan	Internal KPU	C	Target sasaran kegiatan Penerapan Lap. Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan Valid tidak terpenuhi	Internal KPU	Dilakukan pemeriksaan sebelum waktu pengisian atau penginputan	Tidak ada sisa risiko	1
38	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	Peraturan KPU tidak tepat waktu/terlambat diterbitkan	Regulasi KPU terlambat diterbitkan	Sub Bagian Hukum	Regulasi KPU tidak diterima tepat waktu	Eksternal KPU	C	Target sasaran kegiatan persentase rancangan peraturan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang disusun dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU tidak terpenuhi	Internal KPU; Eksternal KPU/ Pihak terkait	Menganalisa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di atasnya	Tidak ada sisa risiko	2

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U C	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	Adanya kekurangan logistik Pemilu/Pemilihan di tingkat Badan Ad Hoc	Kurangnya pengawasan pengelolaan logistik	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pada waktu pengisian logistik tidak diawasi sehingga adanya ketidaktepatan dalam jumlah pengisian	Internal KPU	C	Adanya kekurangan logistik	Internal KPU; Eksternal KPU/ Pihak terkait	Kekurangan logistik diadakan kembali dan dikirimkan kembali	Terganggunya tahapan dengan distribusi logistik yang berulang-ulang	4
40	Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	Jika terjadi bencana menyebabkan tertundanya Pemilu/Pemilihan; Jika tidak tercapainya target rekrutmen badan ad hoc menyebabkan Pemilu/Pemilihan tidak diselenggarakan sesuai jadwal	Perubahan jadwal tahapan	Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Adanya kegiatan tahapan yang tidak mencapai target sehingga harus diperpanjang; atau adanya musibah	Internal KPU; Eksternal KPU	C	Adanya perubahan jadwal tahapan	Internal KPU; Eksternal KPU	Mengikuti perubahan jadwal tahapan sesuai dengan regulasi KPU	Tidak ada sisa resiko	5
41	Persentase Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Pengelolaan Produk hukum yang disusun, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan dengan baik	Terkendalanya pengelolaan Produk hukum yang disusun, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	Sub Bagian Hukum	Kekurangan SDM yang mengelola Produk Hukum	Internal KPU	C	Target sasaran kegiatan persentase Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU tidak terpenuhi	Internal KPU; Eksternal KPU	Pengelolaan Dokumen Hukum diawasi dan disusun oleh Kasubbag	Tidak ada sisa resiko	5
42	Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	Pengelolaan Dokumen dan Pelayanan Hukum tidak dikelola dengan baik	Terkendalanya Pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Sub Bagian Hukum	Kekurangan SDM yang mengelola Produk Hukum	Internal KPU	C	Target sasaran kegiatan persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan tidak terpenuhi	Internal KPU; Eksternal KPU	Pengelolaan Dokumen dan Pelayanan Hukum dipublikasikan dan disosialisasikan melalui JDIH KPU Bolmong dan medsos JDIH KPU Bolmong	Tidak ada sisa resiko	5

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U C	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Kabupaten/Kota	Anggaran penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum tidak mencukupi	Terkendalanya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Sub Bagian Hukum	Proses perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow bisa berkali-kali tergantung pada alat bukti yang disajikan	Internal KPU; Eksternal KPU	UC	Target sasaran kegiatan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow tidak terpenuhi	Internal KPU; Eksternal KPU	Melakukan koordinasi advokasi hukum ke KPU Provinsi Sulawesi Utara atau KPU RI	Tidak ada sisa risiko	3
44	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	Anggaran penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum tidak mencukupi	Terkendalanya sengketa hukum yang dimenangkan	Sub Bagian Hukum	Proses perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow bisa berkali-kali tergantung pada alat bukti yang disajikan	Internal KPU; Eksternal KPU	UC	Target sasaran kegiatan persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow tidak terpenuhi	Internal KPU; Eksternal KPU	Melakukan koordinasi advokasi hukum ke KPU Provinsi Sulawesi Utara atau KPU RI	Tidak ada sisa risiko	3
45	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	Peraturan KPU diterbitkan tidak tepat waktu/terlambat, sehingga penyusunan kurang optimal atau dilaksanakan dengan terburu-buru	Regulasi KPU terlambat diterbitkan	Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Penyusunan dilakukan terburu-buru	Internal KPU	C	Adanya kegiatan yang tidak dijelaskan dalam petunjuk teknis	Internal KPU; Eksternal KPU	Sebelum waktu tahapan penyusunan telah dipersiapkan	Tidak ada sisa risiko	3
46	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2024	Jika terjadi bencana menyebabkan terkendalanya penetapan daerah pemilihan yang tepat waktu	Terkendalanya penyusunan dan penetapan Daerah Pemilihan	Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Data penduduk akan berubah-ubah dan proses penyusunan akan terkendala karena harus meminta pernyataan terjadinya bencana serta data terkait jumlah korban jiwa dan daerah terdampak kepada Pemerintah Daerah	Eksternal KPU	UC	Target sasaran kegiatan persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2024 tidak terpenuhi	Internal KPU; Eksternal KPU	Berkoordinasi dengan KPU RI melalui KPU Provinsi Sulawesi Utara terkait penetapan Daerah Pemilihan	Permasalahan terkait Daerah Pemilihan harus memenuhi syarat Penetapan Daerah Pemilihan	5

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U C	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	Anggaran dalam melaksanakan proses PAW tidak tersedia sehingga harus diusulkan dan direvisi	Terkendalanya proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow	Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Proses pelaksanaan PAW, antara lain melaksanakan klarifikasi dengan calon PAW, penyampaian dokumen PAW ke pihak Pemkab dan pihak Pemprov maupun penyampaian laporan hasil pelaksanaan PAW ke KPU Provinsi, sebagaimana telah dilaksanakan pada tahun 2021 (jumlah PAW 2 orang)	Internal KPU	C	Target sasaran kegiatan Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja tidak terpenuhi	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	Diusulkan untuk dilakukan revisi anggaran	Tidak ada sisa resiko	5
48	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	Tergantung dari Calon Peserta Pemilu yang mendaftar atau lolos verifikasi	Terkendalanya fasilitasi Calon Peserta Pemilu	Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Jumlah Calon Peserta Pemilu tidak dapat diprediksi karena harus sesuai dengan aturan regulasi KPU	Internal KPU; Eksternal KPU	UC	Anggaran yang diusulkan dapat lebih ataupun kurang dari yang dibutuhkan	Internal KPU	Dapat dilakukan revisi anggaran	Tidak ada sisa resiko	3
49	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Peraturan KPU diterbitkan tidak tepat waktu/terlambat, sehingga penyusunan kurang optimal atau dilaksanakan dengan terburu-buru	Regulasi KPU terlambat diterbitkan	Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Rancangan Pedoman yang telah tersusun harus dilakukan perubahan	Internal KPU	UC	Target sasaran kegiatan Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung Tata Kelola Pemilu tidak terpenuhi	Internal KPU; Eksternal KPU	Menyusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di atas regulasi KPU atau regulasi KPU pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya	Tidak ada sisa resiko	3
50	Jumlah Dokumen SOP atau Petunjuk Teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	Peraturan KPU diterbitkan tidak tepat waktu/terlambat, sehingga penyusunan kurang optimal atau dilaksanakan dengan terburu-buru	Terkendalanya pengelolaan Produk hukum yang disusun, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Penyusunan dilakukan terburu-buru	Internal KPU	C	Adanya kegiatan yang tidak dijelaskan dalam petunjuk teknis	Internal KPU; Eksternal KPU	Penyusunan dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di atas regulasi KPU atau menggunakan regulasi KPU pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya	Tidak ada sisa resiko	3

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U C	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik yang dimutakhirkan	Kurangnya informasi terkait no telepon pengurus yang dapat dihubungi; Kurangnya respon dari beberapa pengurus/ LO Partai Politik terhadap permintaan data/ dokumen kepengurusan Partai Politik termuktahir; Beberapa Partai Politik belum melaksanakan Musyawarah Nasional, sedangkan SK kepengurusan telah lewat masa berlakunya.	Tidak diinformasikannya kedudukan Sekretariat dan Struktur Kepengurusan Partai Politik ke KPU Kabupaten ketika terjadi perubahan; Kurangnya informasi terkait no telepon pengurus yang dapat dihubungi; adanya pergantian pengurus Parpol yang tidak diinformasikan ke KPU Kabupaten Bolaang Mongondow; Dualisme Kepengurusan Partai Politik	Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Partai Politik kurang kerjasama	Eksternal KPU	UC	Informasi KPU tidak dapat diterima oleh semua Partai Politik, sehingga dapat menjadi celah sengketa terkait prinsip adil dan setara	Internal KPU; Eksternal KPU	Berkoordinasi dengan pengurus Parpol dan Pemda (Kesbangpol)	Partai Politik terlambat mengikuti tahapan	3
52	Kabupaten yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	Tidak adanya anggaran dalam membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	Tidak ada Pusat Pendidikan Pemilih	Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Tidak ada anggaran dalam pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih	Internal KPU	UC	Target sasaran kegiatan KPU Kabupaten yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih tidak terpenuhi	Internal KPU; Eksternal KPU	Mengusulkan anggaran untuk membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	Belum terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih	5
53	Persentase KPU Kabupaten yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	Oleh karena belum mempunyai gedung kantor paten sehingga fasilitas RPP setiap berpindah kantor harus disusun kembali dan Tidak tersedianya anggaran pembentukan maupun Digitalisasi RPP	Terkendalanya pengelolaan RPP	Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Tidak Tersedianya anggaran	Internal KPU	C	Fasilitas RPP harus disusun kembali	Internal KPU	Perengkapan RPP menggunakan perlengkapan RPP yang telah diadakan sebelumnya	Tidak tercapainya target sasaran kegiatan Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang dilengkapi dengan digitalisasi RPP	5
54	Persentase satker KPU Kabupaten yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	Tidak tersedianya anggaran untuk membentuk "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	Tidak adanya anggaran pembentukan Pendidikan Pemilih	Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Kegiatan tidak teranggarkan dalam perencanaan	Internal KPU	UC	Target sasaran kegiatan tidak terpenuhi	Internal KPU; Eksternal KPU	Melakukan kegiatan sosialisasi melalui website dan medsos resmi	Kurangnya kesadaran Pemilih	4
55	Persentase satker KPU Kabupaten yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Perempuan	Tidak tersedianya anggaran untuk membentuk "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Perempuan	Tidak adanya anggaran pembentukan Pendidikan Pemilih	Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Kegiatan tidak teranggarkan dalam perencanaan	Internal KPU	UC	Target sasaran kegiatan tidak terpenuhi	Internal KPU; Eksternal KPU	Melakukan kegiatan sosialisasi melalui website dan medsos resmi	Kurangnya kesadaran Pemilih	4

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U C	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	Persentase satker KPU Kabupaten yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Pemula	Tidak tersedianya anggaran untuk membentuk "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Pemula	Tidak adanya anggaran pembentukan Pendidikan Pemilih	Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Kegiatan tidak teranggarkan dalam perencanaan	Internal KPU	UC	Target sasaran kegiatan tidak terpenuhi	Internal KPU; Eksternal KPU	Melakukan kegiatan sosialisasi melalui website dan medsos resmi	Kurangnya kesadaran Pemilih	4
57	Persentase satker KPU Kabupaten yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Disabilitas	Tidak tersedianya anggaran untuk membentuk "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Disabilitas	Tidak adanya anggaran pembentukan Pendidikan Pemilih	Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Kegiatan tidak teranggarkan dalam perencanaan	Internal KPU	UC	Target sasaran kegiatan tidak terpenuhi	Internal KPU; Eksternal KPU	Melakukan kegiatan sosialisasi melalui website dan medsos resmi	Kurangnya kesadaran Pemilih	4
58	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan/atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	Tidak tersedianya anggaran untuk membentuk "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	Tidak adanya anggaran pembentukan Pendidikan Pemilih	Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Kegiatan tidak teranggarkan dalam perencanaan	Internal KPU	UC	Target sasaran kegiatan tidak terpenuhi	Internal KPU; Eksternal KPU	Melakukan kegiatan sosialisasi melalui website dan medsos resmi	Kurangnya kesadaran Pemilih	4
59	Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Kurangnya sosialisasi pelayanan informasi melalui PPID	Terkendalanya pelaksanaan permohonan informasi melalui PPID	Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Sosialisasi tidak tersampaikan dengan baik	Internal KPU	C	Target sasaran kegiatan Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP tidak terpenuhi	Internal KPU; Eksternal KPU	Sosialisasi melalui website dan medsos serta e-PPID	Permohonan informasi tidak mencapai target	5
60	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Lokal	Tidak tersedianya anggaran informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan dimuat di media massa lokal	Terkendalanya informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan dimuat di media massa lokal	Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Media massa kurang diminati masyarakat sehingga lebih difokuskan pada media sosial dan media online	Internal KPU		Target sasaran kegiatan persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan dimuat di 10 Media Massa Lokal tidak terpenuhi	Internal KPU; Eksternal KPU	Publikasi dilakukan melalui media sosial maupun media online	Tidak ada sisa resiko	3

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U C	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	Kekurangan SDM yang melaksanakan tugas pengelolaan informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan dan SDM yang tersedia kurang berkompotensi untuk melakukan pengelolaan informasi dan publikasi	Terkendalanya informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	SDM kurang berkompotensi sehingga SDM yang ada memiliki tugas dengan beban kerja yang lebih berat	Internal KPU	C	Target sasaran kegiatan persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari tidak terpenuhi	Internal KPU	Jika ada kegiatan harus dipublikasikan sesuai Sub Bagian/Divisi terkait	Tidak ada sisa resiko	4
62	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	Kekurangan SDM yang melaksanakan tugas pengelolaan informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan dan SDM yang tersedia kurang berkompotensi untuk melakukan pengelolaan informasi dan publikasi	Terkendalanya informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	SDM kurang berkompotensi sehingga SDM yang ada memiliki tugas dengan beban kerja yang lebih berat	Internal KPU	C	Target sasaran kegiatan persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari tidak terpenuhi	Internal KPU	Jika ada kegiatan harus dipublikasikan sesuai Sub Bagian/Divisi terkait	Tidak ada sisa resiko	4
63	Persentase KPU Kabupaten yang Menyenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	Kekurangan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan logistik	Kurangnya pengawasan pengelolaan logistik	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Adanya kekurangan logistik sehingga harus diadakan kembali	Internal KPU	C	Target sasaran kegiatan Persentase KPU Kabupaten yang Menyenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik tidak terpenuhi	Internal KPU; Eksternal KPU	Merencanakan kebutuhan logistik yang kekurangan atau yang akan diadakan kembali	Tidak ada sisa resiko	4
64	Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu /Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	Kekurangan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan logistik	Kurangnya pengawasan pengelolaan logistik	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Adanya pengadaan formulir yang tidak masuk dalam perencanaan kebutuhan logistik	Internal KPU	C	Target sasaran kegiatan Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu /Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara tidak terpenuhi	Internal KPU; Eksternal KPU	Tetap mengadakan logistik yang diperlukan sesuai dengan regulasi KPU	Tidak ada sisa resiko	4

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U C	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	Adanya kekurangan logistik Pemilu/Pemilihan di tingkat Badan Ad Hoc	Kurangnya pengawasan pengelolaan logistik	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Adanya kesalahan penghitungan jumlah logistik	Internal KPU	C	Target sasaran kegiatan Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu tidak terpenuhi	Internal KPU; Eksternal KPU	Tetap mendistribusikan logistik yang kekurangan	Tidak ada sisa resiko	4
66	Persentase KPU Kabupaten / Kota menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	Adanya kekurangan logistik Pemilu/Pemilihan di tingkat Badan Ad Hoc	Kurangnya pengawasan pengelolaan logistik	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Adanya logistik yang hilang	Internal KPU	C	Target sasaran kegiatan Persentase KPU Kabupaten / Kota menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu tidak terpenuhi	Internal KPU; Eksternal KPU	Pengelolaan logistik dilaksanakan sesuai jadwal tahapan	Tidak ada sisa resiko	4
67	Persentase penyediaan logistik Pemilu	Adanya kekurangan logistik Pemilu/Pemilihan di tingkat Badan Ad Hoc	Kurangnya pengawasan pengelolaan logistik	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Adanya kesalahan penghitungan jumlah logistik	Internal KPU	C	Target sasaran kegiatan Persentase penyediaan logistik Pemilu tidak terpenuhi	Internal KPU; Eksternal KPU	Mengadakan logistik yang kekurangan	Tidak ada sisa resiko	4
68	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	Adanya permasalahan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang atau Penghitungan Suara Ulang; Adanya permasalahan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara; Adanya permasalahan dalam Penetapan Hasil Pemilu	Adanya permasalahan suara Pemilih	Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Suara Pemilih tidak sah	Eksternal KPU	UC	Dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang atau Penghitungan Suara Ulang; Rekapitulasi berjalan tidak lancar, PHPU atau PHP	Internal KPU; Eksternal KPU	Badan Ad hoc diberikan bimbingan teknis	Sengketa hukum	5
69	Persentase KPU Kabupaten/ Kota melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	Tidak tersedianya anggaran untuk ke Kecamatan/Kelurahan untuk kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan	Terkendalanya kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	Sub Bagian Program dan Data	Tidak Tersedianya anggaran	Internal KPU	C	Target sasaran kegiatan Persentase KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan tidak terpenuhi	Internal KPU	memanfaatkan mantan PPK yang masih bersedia untuk bekerja sama dalam memperoleh data kependudukan yang ada di kecamatan/desa	Bertambahnya jumlah masyarakat yang masuk wajib pilih di kecamatan/ desa yang tidak masuk dalam DPT	4

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U C	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	Seringnya mati lampu; Pindah kantor baru menyebabkan wifi kantor juga harus dipindahkan dan menyesuaikan dengan lokasi kantor baru	Jaringan internet dalam kantor sering berpindah karena mengikuti perpindahan kantor	Sub Bagian Program dan Data	Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi harus dipasang kembali jika pindah ke kantor baru	Internal KPU	C	Kegiatan yang menggunakan Teknologi Informasi menjadi terhambat	Internal KPU	Diberikan anggaran untuk membeli paket data sebelum Wifi kantor dipasang kembali	Tidak ada sisa resiko	5
71	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	Link masih dibuatkan secara manual atau belum melalui aplikasi tertentu	Sistem Aplikasi KPU yang diterapkan belum terintegrasi	Sub Bagian Program dan Data	Aplikasi KPU yang diterapkan belum terintegrasi	Internal KPU	C	Informasi dan Data menggunakan hyperlink	Internal KPU; Eksternal KPU	Hyperlink disosialisasikan melalui website dan medsos resmi	Tidak ada sisa resiko	4

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 2 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Evie Jane Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN  
PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN 2023

PETA RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik; Sub Bagian Program dan Data; Sub Bagian  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; serta Sub Bagian  
Hukum dan SDM

Periode Penerapan : 2023

No	Sisa Resiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6	$7 = 4 \times 6$	8
1	Fasilitasi Kerjasama dengan Instansi terkait menunggu hasil koordinasi dengan KPU RI	Tidak dapat dilaksanakan jika tidak ada nota kesepahaman antara KPU dan Instansi terkait atau tidak adanya koordinasi dengan KPU RI	5	Sesuai dengan Surat Dinas KPU RI Nomor: 329/PR.07-SD/01/KPU/IV/2021 Tanggal 12 April 2021 Perihal: Penyampaian Daftar Nota Kesepahaman KPU dan Permohonan Daftar Inventarisasi Nota Kesepahaman serta Surat Dinas KPU RI	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Instansi terkait menunggu hasil koordinasi dengan KPU RI	1	5	Rendah

No	Sisa Resiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6	$7 = 4 \times 6$	8
				Nomor: 846/PR.07/04/2021 Tanggal 17 September 2021 Perihal: Kerja Sama di Lingkungan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota				
2	Kurangnya motivasi dalam peningkatan kompetensi secara mandiri	Kurangnya kegiatan peningkatan kompetensi Pegawai	2	Tidak adanya evaluasi kompetensi Pegawai secara internal	Pegawai ditempatkan tidak memiliki kompetensi yang sesuai	2	4	Rendah
3	Sarana peralatan kantor dalam keadaan rusak dan tidak dapat digunakan	Tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	5	Peralatan Kantor sudah tidak dapat diperbaiki atau biaya perbaikan sangat mahal	Tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	3	15	Ekstrim
4	meminimalisir hasil temuan setiap tahun anggaran	melakukan kegiatan sesuai dengan regulasi yang ada	5	melakukan pengawasan secara terus menerus	kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang ada	3	9	Tinggi

No	Sisa Resiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6	$7 = 4 \times 6$	8
5	Masih ada Pegawai yang kurang disiplin	Kurangnya implementasi budaya organisasi	3	Tidak adanya Sanksi yang diberikan	Pegawai bersikap acuh tak acuh	2	6	Sedang
6	Bertambahnya jumlah masyarakat yang masuk wajib pilih di kecamatan/ desa yang tidak masuk dalam DPT	DPT yang ada mutakhir, valid dan akurat	5	sengketa terkait dengan DPT berkurang	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor apabila tidak masuk dalam DPT	3	9	Tinggi
7	Fasilitasi Kerjasama dengan Instansi terkait menunggu hasil koordinasi dengan KPU RI	Tidak dapat dilaksanakan jika tidak ada nota kesepahaman antara KPU dan Instansi terkait atau tidak adanya koordinasi dengan KPU RI	5	Sesuai dengan Surat Dinas KPU RI Nomor: 329/PR.07-SD/01/KPU/IV/2021 Tanggal 12 April 2021 Perihal: Penyampaian Daftar Nota Kesepahaman KPU dan Permohonan Daftar Inventarisasi Nota Kesepahaman serta Surat Dinas KPU RI Nomor: 846/PR.07/04/2021 Tanggal 17 September	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Instansi terkait menunggu hasil koordinasi dengan KPU RI	1	5	Rendah

No	Sisa Resiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6	$7 = 4 \times 6$	8
				2021 Perihal: Kerja Sama di Lingkungan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota				
8	beberapa kegiatan tidak terakomodir	kegiatan yang tidak terakomodir bisa di usulkan kembali	2	kegiatan yang tidak terakomodir bisa dilaksanakan untuk tahun anggaran berikutnya	kegiatan yang sudah di rencanakan tidak di laksanakan	1	5	Rendah
9	Penyusunan hanya sebatas pelaporan dan tidak diperiksa	Belum terlaksananya secara internal terkait pemahaman, diseminasi terkait SPIP, pemetaan kondisi pengendalian intern, penyusunan rencana kerja dan pengembangan SPIP, pembangunan infrastruktur, internalisasi, serta pengembangan berkelanjutan.	2	Implementasi SPIP belum terlaksana dengan baik	Adanya sanksi Peringatan	3	6	Sedang
10	pelaksanaan kegiatan tidak maksimal	output dari kegiatan tidak maksimal	2	karena kurangnya anggaran	tidak tercapai target yang telah di rencanakan	2	4	Rendah

No	Sisa Resiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6	$7 = 4 \times 6$	8
11	Target Sasaran Kegiatan tidak terpenuhi	Masih adanya toleransi untuk kebijakan penegakan disiplin pegawai	4	Tidak adanya Sanksi yang diberikan	Pegawai bersikap acuh tak acuh	2	8	Sedang
12	Persentase Pegawai KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi tidak terpenuhi	Pegawai tidak dapat bekerjasama	4	Keterlambatan penginputan data base kepegawaian	Target sasaran kegiatan tidak terpenuhi	2	8	Sedang
13	Calon Badan Ad Hoc tidak berkompentensi melaksanakan tugas	Badan Ad Hoc yang terbentuk tidak memiliki kompetensi	5	Kurangnya minat pendaftar	Adanya pelanggaran-pelanggaran	4	20	Ekstrim
14	Target Sasaran Kegiatan tidak terpenuhi	Aset BMN tidak pernah dikembalikan lagi	5	Pegawai yang bertanggungjawab sudah tidak bekerja di KPU Kabupaten Bolaang Mongonodw	Terjadinya ketidakpatuhan terhadap pengelolaan BMN secara material	2	10	Tinggi

No	Sisa Resiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6	$7 = 4 \times 6$	8
15	Target Sasaran Kegiatan tidak terpenuhi	Aset BMN tidak pernah dikembalikan lagi	5	Pegawai yang bertanggungjawab sudah tidak bekerja di KPU Kabupaten Bolaang Mongonodw	Akan ada data yang tidak sesuai dalam pengelolaan BMN	2	10	Tinggi
16	Target Sasaran Kegiatan tidak terpenuhi	Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip tidak berkualitas	5	Pegawai tidak memahami retensi arsip	Adanya arsip-arsip yang seharusnya dimusnahkan tetapi disimpan, sedangkan yang seharusnya disimpan telah musnah	2	10	Tinggi
17	Sarana transportasi sudah tidak dapat diperbaiki atau biaya perbaikan sangat mahal	Tidak terpenuhinya kebutuhan pegawai dalam melaksanakan tugas	5	Tidak memiliki transportasi operasional untuk menjalankan tugas	Memakai kendaraan pribadi atau dana pribadi untuk membayar ongkos transportasi	1	5	Rendah
18	Target Sasaran Kegiatan tidak terpenuhi	Tidak ada peralatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pegawai	5	Peralatan kantor seperti printer, scanner tidak ada atau dalam keadaan rusak	Pegawai tidak dapat bekerja dengan optimal	2	10	Tinggi

No	Sisa Resiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6	$7 = 4 \times 6$	8
19	Target Sasaran Kegiatan tidak terpenuhi	Tiap tahun harus mengusulkan anggaran sewa Gedung dan Gudang Kantor	5	Belum memiliki kantor dan gudang tetap	Tiap tahun harus melakukan sewa kantor dan gudang KPU	1	5	Rendah
20	Jika ada kehilangan barang akan ditelusuri melalui kamera cctv	Keamanan kantor tidak meliputi keamanan barang	2	Tenaga honorer hanya menjaga kantor tetapi tidak memperhatikan barang yang ada di kantor	Adanya keluhan kehilangan barang	2	4	Rendah
21	Adanya temuan pada pegawai yang sudah tidak bekerja lagi di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Surat Pertanggungjawaban sudah hilang	4	Kelebihan bayar ditemukan setelah Pegawai yang bersangkutan tidak bekerja lagi di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Adanya temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti	3	12	Tinggi
22	Beban kerja yang lebih berat	Adanya arahan-arahan dari KPU RI maupun KPU Provinsi Sulawesi Utara yang harus ditindaklanjuti sementara hal tersebut tidak sesuai dengan anggaran yang tertata	5	Hal-hal yang mendesak harus ditindaklanjuti	Beban kerja menjadi lebih berat	3	15	Tinggi

No	Sisa Resiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6	$7 = 4 \times 6$	8
23	Target Sasaran Kegiatan tidak terpenuhi	Tidak adanya kegiatan Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	5	Tidak ada perencanaan kegiatan	Jumlah dokumen Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan tidak terpenuhi	1	5	Rendah
24	Terganggunya tahapan dengan distribusi logistik yang berulang-ulang	Adanya kekurangan logistik	5	Ketidaktelitian dalam menghitung jumlah logistik	Harus direncanakan kembali untuk pengadaan logistik yang kurang	3	15	Ekstrim
25	Permasalahan terkait Daerah Pemilihan harus memenuhi syarat Penetapan Daerah Pemilihan	Adanya bencana yang tidak dapat diprediksi sebelumnya	5	Cuaca ekstrim atau banjir menyebabkan perpindahan penduduk	Adanya perpindahan penduduk	1	5	Rendah
26	Partai Politik terlambat mengikuti tahapan	Tidak tersampainya informasi kepada Partai Politik	5	Partai Politik tidak memberikan informasi yang mutakhir	Adanya informasi yang tidak tersampaikan kepada Partai Politik	1	5	Rendah

No	Sisa Resiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6	$7 = 4 \times 6$	8
27	Belum terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih	Tidak teranggarkannya kegiatan Pusat Pendidikan Pemilih	5	Kegiatan belum terakomodir di tahun 2021	Tidak tercapainya target di tahun 2021	1	5	Rendah
28	Tidak tercapainya target sasaran kegiatan Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang dilengkapi dengan digitalisasi RPP	Kegiatan tidak terakomodir di tahun 2021	5	Anggaran dipangkas untuk refocusing	Tidak tercapainya target di tahun 2021	1	5	Rendah
29	Kurangnya kesadaran Pemilih	Tidak adanya kegiatan pembentukan Pendidikan Pemilih	5	Kegiatan tidak terakomodir di tahun 2021	Tidak tercapainya target di tahun 2021	1	5	Rendah
30	Kurangnya kesadaran Pemilih	Tidak adanya kegiatan pembentukan Pendidikan Pemilih	5	Kegiatan tidak terakomodir di tahun 2021	Tidak tercapainya target di tahun 2021	1	5	Rendah

No	Sisa Resiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6	$7 = 4 \times 6$	8
31	Kurangnya kesadaran Pemilih	Tidak adanya kegiatan pembentukan Pendidikan Pemilih	5	Kegiatan tidak terakomodir di tahun 2021	Tidak tercapainya target di tahun 2021	1	5	Rendah
32	Kurangnya kesadaran Pemilih	Tidak adanya kegiatan pembentukan Pendidikan Pemilih	5	Kegiatan tidak terakomodir di tahun 2021	Tidak tercapainya target di tahun 2021	1	5	Rendah
33	Kurangnya kesadaran Pemilih	Tidak adanya kegiatan pembentukan Pendidikan Pemilih	5	Kegiatan tidak terakomodir di tahun 2021	Tidak tercapainya target di tahun 2021	1	5	Rendah
34	Permohonan informasi tidak mencapai target	Kurangnya sosialisasi permohonan informasi melalui e-PPID	5	Pemohon Informasi tidak mencapai target	Permohonan Informasi Publik sangat kurang	1	5	Rendah
35	Sengketa hukum	Adanya selisih suara Pemilih	5	Adanya ketidaksesuaian data atau kesalahan penghitungan suara	Adanya sengketa hukum	4	20	Ekstrim

No	Sisa Resiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6	$7 = 4 \times 6$	8
36	Bertambahnya jumlah masyarakat yang masuk wajib pilih di kecamatan/ desa yang tidak masuk dalam DPT	Anggaran kegiatan sangat minim	5	Anggaran tidak mencukupi untuk dilakukan monitoring ke tingkat Kecamatan/Kelurahan	Mencari data melalui Mantan PPK dan PPS	1	5	Rendah

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 2 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Evie Jane Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN  
PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN 2023

INDIKATOR RESIKO

Unit Pemilik Risiko : Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik; Sub Bagian Program dan Data; Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; serta Sub Bagian Hukum dan SDM

Periode Penerapan : 2023

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Fasilitasi Kerjasama dengan Instansi terkait menunggu hasil koordinasi dengan KPU RI	5	2	5	Fasilitasi Kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka penguatan demokrasi tidak terpenuhi	5
2	Kurangnya motivasi dalam peningkatan kompetensi secara mandiri	4	7	5	Pegawai ditempatkan tidak memiliki kompetensi yang sesuai	5

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
3	Sarana peralatan kantor dalam keadaan rusak dan tidak dapat digunakan	15	7	9	Sarana peralatan kantor tidak dapat menunjang kinerja pegawai	9
4	meminimalisir hasil temuan setiap tahun anggaran	9	4	8	BPK akan turun untuk menindak lanjuti hasil temuan	8
5	Masih ada Pegawai yang kurang disiplin	6	6	4	Adanya Pegawai yang tidak patuh terhadap aturan	4
6	Bertambahnya jumlah masyarakat yang masuk wajib pilih di kecamatan/ desa yang tidak masuk dalam DPT	9	3	8	akan terjadi sengketa	8
7	Fasilitasi Kerjasama dengan Instansi terkait menunggu hasil koordinasi dengan KPU RI	5	5	5	Tidak ada kerjasama dalam rangka penguatan demokrasi	5

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
8	beberapa kegiatan tidak terakomodir	5	2	5	kegiatan tersebut tidak di laksanakan	5
9	Penyusunan hanya sebatas pelaporan dan tidak diperiksa	6	1	4	Kurangnya pemahaman terhadap SPIP	4
10	pelaksanaan kegiatan tidak maksimal	4	7	5	target kinerja tidak tercapai	5
11	Target Sasaran Kegiatan tidak terpenuhi	8	6	6	Adanya Pegawai yang tidak patuh terhadap aturan	6
12	Persentase Pegawai KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi tidak terpenuhi	8	6	6	Adanya Pegawai yang tidak patuh terhadap aturan	6

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
13	Calon Badan Ad Hoc tidak berkompotensi melaksanakan tugas	20	7	11	Badan Ad hoc yang terbentuk tidak memiliki kompetensi sebelumnya	11
14	Target Sasaran Kegiatan tidak terpenuhi	10	7	9	Pengelolaan Aset tidak dapat dilakukan secara patuh dan tertib	9
15	Target Sasaran Kegiatan tidak terpenuhi	10	7	9	Target sasaran kegiatan Laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK tidak terpenuhi	9
16	Target Sasaran Kegiatan tidak terpenuhi	10	7	9	Target sasaran kegiatan persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan tidak terpenuhi	9
17	Sarana transportasi sudah tidak dapat diperbaiki atau biaya perbaikan sangat mahal	5	7	5	Target sasaran kegiatan persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi tidak tercapai	5

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
18	Target Sasaran Kegiatan tidak terpenuhi	10	7	9	Target sasaran kegiatan persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi tidak tercapai	9
19	Target Sasaran Kegiatan tidak terpenuhi	5	7	5	Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Bolaang Mongondow sering berpindah tempat	5
20	Jika ada kehilangan barang akan ditelusuri melalui kamera cctv	4	7	5	Adanya keluhan kehilangan barang	5
21	Adanya temuan pada pegawai yang sudah tidak bekerja lagi di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	12	1	8	Adanya temuan yang masih ditindak lanjuti	8
22	Beban kerja yang lebih berat	15	7	9	Adanya beban kerja yang lebih berat	9
23	Target Sasaran Kegiatan tidak terpenuhi	5	2	5	Tidak terpenuhinya target sasaran kegiatan Jumlah Dokumen Riset dan Kepemiluan	5

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
24	Terganggunya tahapan dengan distribusi logistik yang berulang-ulang	15	1	9	Adanya kekurangan logistik	9
25	Permasalahan terkait Daerah Pemilihan harus memenuhi syarat Penetapan Daerah Pemilihan	5	5	5	Target sasaran kegiatan persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2024 tidak terpenuhi	5
26	Partai Politik terlambat mengikuti tahapan	5	3	5	Informasi KPU tidak dapat diterima oleh semua Partai Politik, sehingga dapat menjadi celah sengketa terkait prinsip adil dan setara	5
27	Belum terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih	5	3	5	Target sasaran kegiatan KPU Kabupaten yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih tidak terpenuhi	5
28	Tidak tercapainya target sasaran kegiatan Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang	5	3	5	Fasilitas RPP harus disusun kembali	5

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
	dilengkapi dengan digitalisasi RPP					
29	Kurangnya kesadaran Pemilih	5	3	5	Target sasaran kegiatan Persentase satker KPU Kabupaten yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum tidak terpenuhi	5
30	Kurangnya kesadaran Pemilih	5	3	5	Target sasaran kegiatan Persentase satker KPU Kabupaten yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Perempuan tidak terpenuhi	5
31	Kurangnya kesadaran Pemilih	5	3	5	Target sasaran kegiatan Persentase satker KPU Kabupaten yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Pemula tidak terpenuhi	5

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
32	Kurangnya kesadaran Pemilih	5	3	5	Target sasaran kegiatan Persentase satker KPU Kabupaten yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Disabilitas tidak terpenuhi	5
33	Kurangnya kesadaran Pemilih	5	3	5	Target sasaran kegiatan Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan/atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" tidak terpenuhi	5
34	Permohonan informasi tidak mencapai target	5	3	5	Target sasaran kegiatan Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP tidak terpenuhi	5
35	Sengketa hukum	20	5	11	Dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang atau Penghitungan Suara Ulang; Rekapitulasi berjalan tidak lancar, PHPU atau PHP	11

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
36	Bertambahnya jumlah masyarakat yang masuk wajib pilih di kecamatan/ desa yang tidak masuk dalam DPT	5	3	5	Target sasaran kegiatan Persentase KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan tidak terpenuhi	5

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 2 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Evie Jane Indria, S.H., M.Si



LAMPIRAN VII  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN  
PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN 2023

KEGIATAN PENGENDALIAN/RENCANA AKSI PENGENDALIAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik; Sub Bagian Program dan Data; Sub Bagian  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; serta Sub Bagian  
Hukum dan SDM  
Periode Penerapan : 2023

No	Indikator Risiko		Opsis Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Fasilitasi Kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka penguatan demokrasi tidak terpenuhi	5	Tidak diperlukan tindakan ( <i>Acceptable</i> )	Rencana Kerjasama dikoordinasikan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Sulawesi Utara	Menunggu hasil koordinasi	100%	2023	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	-

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pegawai ditempatkan tidak memiliki kompetensi yang sesuai	5	Tidak diperlukan tindakan ( <i>Acceptable</i> )	Dihimbau untuk melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri	Laporan Kinerja Mingguan	95%	2023	Sub Hukum dan SDM	
3	Sarana peralatan kantor tidak dapat menunjang kinerja pegawai	9	Diperlukan <b>tindakan</b> untuk mengelola risiko ( <i>Issue</i> )	Menggunakan fasilitas sarana dan prasarana yang ada	Pengadaan Jasa Servis	100%	2023	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
4	BPK akan turun untuk menindak lanjuti hasil temuan	8	Diambil tindakan jika tersedia sumberdaya ( <i>Supliementary Issue</i> )	LAKIP dapat digunakan untuk perbaikan kinerja di tahun berikutnya	Menindaklanjuti temuan APIP, Laporan SPIP tiap bulan	100%	2023	Sub Bagian Program dan Data	
5	Adanya Pegawai yang tidak patuh terhadap aturan	4	Tidak diperlukan tindakan ( <i>Acceptable</i> )	Diimplementasikan sebagai bagian dari SPIP	Kedisiplinan pegawai mulai disosialisasikan sebagai budaya organisasi	100%	2023	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik; Sub Bagian Program dan Data; Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan	

No	Indikator Risiko		Opsii Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Masyarakat; dan Sub Hukum dan SDM	
6	Bertambahnya jumlah masyarakat yang masuk wajib pilih di kecamatan/ desa yang tidak masuk dalam DPT	8	Diambil tindakan jika tersedia sumberdaya ( <i>Supliementary Issue</i> )	memanfaatkan mantan PPK yang masih bersedia untuk bekerja sama dalam memperoleh data kependudukan yang ada di kecamatan/desa	melaksanakan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan setiap bulan	100%	2023	Sub Bagian Program dan Data	
7	Tidak ada kerjasama dalam rangka penguatan demokrasi	5	Tidak diperlukan tindakan ( <i>Acceptable</i> )	Rencana Kerjasama dikoordinasikan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Sulawesi Utara	Menunggu hasil koordinasi	100%	2023	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
8	kegiatan tersebut tidak dilaksanakan	5	Tidak diperlukan tindakan ( <i>Acceptable</i> )	melakukan pencermatan anggaran	melakukan revisi anggaran	100%	2023	Sub Bagian Program dan Data	
9	Kurangnya pemahaman terhadap SPIP	4	Tidak diperlukan tindakan ( <i>Acceptable</i> )	Laporan monitoring dan evaluasi sesuai jadwal	Laporan Kartu Kendali SPIP tiap Bulan, Laporan SPIP Tiap	100%	2023	Sub Bagian Hukum dan SDM	

No	Indikator Risiko		Opsii Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Semester dan Tahun				
10	target kinerja tidak tercapai	5	Tidak diperlukan tindakan ( <i>Acceptable</i> )	melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersisa	Revisi Anggaran	90%	2023	Sub Bagian Program dan Data	
11	Adanya Pegawai yang tidak patuh terhadap aturan	6	Diambil tindakan jika tersedia sumberdaya ( <i>Supliementary Issue</i> )	Tetap terapkan Penegakan Disiplin Pegawai	Peringatan Disiplin	100%	2023	Sub Hukum dan SDM	
12	Adanya Pegawai yang tidak patuh terhadap aturan	6	Diambil tindakan jika tersedia sumberdaya ( <i>Supliementary Issue</i> )	Sebelum batas waktu Pelaporan sudah dipersiapkan untuk disusun dan Pegawai yang bersangkutan ditindak secara tegas untuk memenuhi sasaran kegiatan	Peringatan Disiplin	100%	2023	Sub Hukum dan SDM	

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Badan Ad hoc yang terbentuk tidak memiliki kompetensi sebelumnya	11	Diperlukan <b>tindakan</b> untuk mengelola risiko ( <i>Issue</i> )	Peserta diambil dari desa lain	Laporan Monitoring pendaftaran Badan Ad Hoc	100%	2023	Sub Hukum dan SDM	
14	Pengelolaan Aset tidak dapat dilakukan secara patuh dan tertib	9	Diperlukan <b>tindakan</b> untuk mengelola risiko ( <i>Issue</i> )	Pegawai yang bersangkutan telah dikirimkan surat untuk mengembalikan Aset BMN	Laporan BMN tiap bulan	90%	2023	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
15	Target sasaran kegiatan Laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK tidak terpenuhi	9	Diperlukan <b>tindakan</b> untuk mengelola risiko ( <i>Issue</i> )	Pegawai yang bersangkutan telah dikirimkan surat untuk mengembalikan Aset BMN	Laporan BMN tiap 6 bulan	100%	2023	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	

No	Indikator Risiko		Opsu Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Target sasaran kegiatan persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan tidak terpenuhi	9	Diperlukan <b>tindakan</b> untuk mengelola risiko ( <i>Issue</i> )	Pegawai diminta untuk melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri mengenai aturan kearsipan	Model PPID-A	87,5%	2023	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
17	Target sasaran kegiatan persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi tidak tercapai	5	Tidak diperlukan tindakan ( <i>Acceptable</i> )	Menggunakan anggaran untuk memperbaiki atau servis sarana transportasi	Laporan BMN tiap bulan, Pengadaan Jasa Servis	100%	2023	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Target sasaran kegiatan persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi tidak tercapai	9	Diperlukan <b>tindakan</b> untuk mengelola risiko ( <i>Issue</i> )	Memperbaiki peralatan kantor yang dapat diperbaiki dan mengusulkan anggaran untuk belanja modal peralatan kantor	Laporan BMN tiap bulan, Pengadaan Jasa Servis	100%	2023	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
19	Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Bolaang Mongondow sering berpindah tempat	5	Tidak diperlukan tindakan ( <i>Acceptable</i> )	Mengusulkan hibah tanah dari Pemerintah daerah, jika belum selesai pengurusan, tetap menggunakan anggaran sewa Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Laporan BMN tiap bulan; Pengadaan Sewa Kantor dan Gudang KPU	100%	2023	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Adanya keluhan kehilangan barang	5	Tidak diperlukan tindakan ( <i>Acceptable</i> )	Telah terpasang kamera cctv	Video rekaman CCTV tiap minggu	100%	2023	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
21	Adanya temuan yang masih ditindak lanjuti	8	Diambil tindakan jika tersedia sumberdaya ( <i>Supliementary Issue</i> )	Yang bersangkutan diminta untuk membayar TGR	Matriks tindak lanjut TGR	70%	2023	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
22	Adanya beban kerja yang lebih berat	9	Diperlukan <b>tindakan</b> untuk mengelola risiko ( <i>Issue</i> )	Tetap mengikuti sesuai arahan dan anggaran diusulkan pada periode selanjutnya	Laporan SAKIP	100%	2023	Sub Bagian Program dan Data	
23	Tidak terpenuhinya target sasaran kegiatan Jumlah Dokumen Riset dan Kepemiluan	5	Tidak diperlukan tindakan ( <i>Acceptable</i> )	Sasaran kegiatan diusulkan dalam perencanaan anggaran	Laporan Publikasi Informasi	100%	2023	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Adanya kekurangan logistik	9	Diperlukan <b>tindakan</b> untuk mengelola risiko ( <i>Issue</i> )	Kekurangan logistik diadakan kembali dan dikirimkan kembali	Laporan Evaluasi Logistik	100%	2023	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
25	Target sasaran kegiatan persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2024 tidak terpenuhi	5	Tidak diperlukan tindakan ( <i>Acceptable</i> )	Berkoordinasi dengan KPU RI melalui KPU Provinsi Sulawesi Utara terkait penetapan Daerah Pemilihan	Laporan DIM Penyusunan Dapil	100%	2023	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	

No	Indikator Risiko		Opsii Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Informasi KPU tidak dapat diterima oleh semua Partai Politik, sehingga dapat menjadi celah sengketa terkait prinsip adil dan setara	5	Tidak diperlukan tindakan ( <i>Acceptable</i> )	Berkoordinasi dengan pengurus Parpol dan Pemda (Kesbangpol)	Laporan Pemutakhiran Data Partai Politik	100%	2023	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
27	Target sasaran kegiatan KPU Kabupaten yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih tidak terpenuhi	5	Tidak diperlukan tindakan ( <i>Acceptable</i> )	Mengusulkan anggaran untuk membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	Laporan Pendidikan Pemilih	100%	2023	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
28	Fasilitas RPP harus disusun kembali	5	Tidak diperlukan tindakan ( <i>Acceptable</i> )	Perlengkapan RPP menggunakan perlengkapan RPP yang telah diadakan sebelumnya	Laporan Pengelolaan RPP	50%	2023	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Target sasaran kegiatan Persentase satker KPU Kabupaten yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum tidak terpenuhi	5	Tidak diperlukan tindakan ( <i>Acceptable</i> )	Melakukan kegiatan sosialisasi melalui website dan medsos resmi	Laporan Pendidikan Pemilih	95%	2023	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
30	Target sasaran kegiatan Persentase satker KPU Kabupaten yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Perempuan	5	Tidak diperlukan tindakan ( <i>Acceptable</i> )	Melakukan kegiatan sosialisasi melalui website dan medsos resmi	Laporan Pendidikan Pemilih	95%	2023	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	tidak terpenuhi								
31	Target sasaran kegiatan Persentase satker KPU Kabupaten yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Pemula tidak terpenuhi	5	Tidak diperlukan tindakan ( <i>Acceptable</i> )	Melakukan kegiatan sosialisasi melalui website dan medsos resmi	Laporan Pendidikan Pemilih	95%	2023	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
32	Target sasaran kegiatan Persentase satker KPU Kabupaten yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih	5	Tidak diperlukan tindakan ( <i>Acceptable</i> )	Melakukan kegiatan sosialisasi melalui website dan medsos resmi	Laporan Pendidikan Pemilih	95%	2023	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Disabilitas tidak terpenuhi								

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Target sasaran kegiatan Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan/atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" tidak terpenuhi	5	Tidak diperlukan tindakan ( <i>Acceptable</i> )	Melakukan kegiatan sosialisasi melalui website dan medsos resmi	Laporan Pendidikan Pemilih	95%	2023	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Target sasaran kegiatan Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP tidak terpenuhi	5	Tidak diperlukan tindakan ( <i>Acceptable</i> )	Sosialisasi melalui website dan medsos serta e-PPID	Laporan PPID	100%	2023	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
35	Dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang atau Penghitungan Suara Ulang; Rekapitulasi berjalan tidak lancar, PHPU atau PHP	11	Diperlukan <b>tindakan</b> untuk mengelola risiko ( <i>Issue</i> )	Badan Ad hoc diberikan bimbingan teknis	Laporan Evaluasi Pemilu/ Laporan Evaluasi Pemilihan	100%	2024	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Target sasaran kegiatan Persentase KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan tidak terpenuhi	5	Tidak diperlukan tindakan ( <i>Acceptable</i> )	memanfaatkan mantan PPK yang masih bersedia untuk bekerja sama dalam memperoleh data kependudukan yang ada di kecamatan/desa	Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tiap bulan	100%	2023	Sub Bagian Program dan Data	

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 2 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Evie Janie Indria, S.H., M.Si

